

MEMBANGUN KESADARAN SEJARAH KRITIS DAN INTEGRATIF UNTUK INDONESIA MAJU

BUILDING THE CRITICAL AND INTEGRATIVE HISTORICAL CONSCIOUSNESS FOR INDONESIA ONWARD

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara¹

Universitas Gadjah Mada
(joshuajollysc1723@gmail.com)

Abstrak – Makalah ini membahas pembangunan kesadaran sejarah yang kritis dan integratif untuk mendukung visi Indonesia Maju. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi belakangan ini, bahwa telah muncul sejumlah kerajaan fiktif dengan klaim historis yang tidak masuk akal dan dinilai mengancam integrasi bangsa. Berdasarkan fenomena tersebut dan telaah konsep melalui studi pustaka, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif seputar kesadaran sejarah yang perlu dibangun di tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah era pasca-kebenaran saat ini. Kesadaran sejarah sangat penting karena baik pemikiran kritis maupun nasionalisme dapat berkembang. Fenomena terkini telah menjadi momentum bahwa membangun kesadaran sejarah seharusnya lebih didorong untuk mencegah dampak destruktif dari kemajuan teknologi informasi, seperti berita palsu yang mengarah pada kasus kriminal dan merugikan orang banyak. Jika ditelusuri ke belakang, persoalan ini bukanlah hal baru. Para sejarawan sudah sejak lama mengingatkan pentingnya membangun kesadaran sejarah. Peran setiap pihak sangat penting, mulai dari akademisi, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Oleh sebab itu, membangun kesadaran sejarah bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak inovasi dapat dilakukan sehingga kesadaran sejarah tetap memiliki relevansi dengan kekinian dan keakanan. Dengan demikian, kesadaran sejarah dapat menjadi semakin nyata dan sejarah dapat dirasakan menjadi milik semua.

Kata Kunci: berita bohong, integrasi bangsa, kerajaan fiktif, kesadaran sejarah, pemikiran kritis

Abstract – This paper discusses the building of rational and integrative historical consciousness to sustain the vision of Indonesia Onward. This is inseparable from what has happened lately, that there have emerged several fictitious empires by an unreasonable historical claim and considered to threaten the national integration. Based on this phenomenon and the study of concept through literature study, this paper aims to provide a more comprehensive understanding of historical consciousness that needs to be built amid society, especially during the post-truth era at this time. Historical consciousness is very important because both critical thinking and nationalism can be developed. The latest phenomenon has become a momentum that building historical consciousness should be more encouraged to anticipate the destructive effects of information technology advances, such as hoax that leads to criminal cases and harms many people. If traced back, this problem was not new. Historians have long reminded the importance of building historical consciousness. The role of each party is very important, starting from academics, education, to the wider community. Therefore, building historical consciousness does not mean out of date. Many innovations can be done so historical consciousness still has relevance to the present and future. Thus, historical consciousness can become increasingly real and history can be felt to belong to all.

Keywords: hoax, national integration, fictitious kingdoms, historical consciousness, critical thinking

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pendahuluan

Pada awal 2020, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan sejumlah ‘kerajaan fiktif’. Kerajaan tersebut antara lain Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Tidak tanggung-tanggung, mereka membuat klaim yang fantastis dan cenderung tidak rasional. Di satu sisi, Keraton Agung Sejagat, menurut ‘raja’ Totok Santoso Hadiningrat, merupakan bagian dari kekaisaran dunia yang muncul sebagai konsekuensi telah berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu antara Majapahit dan Portugis. Perjanjian yang dibuat pada 1518 itu diteken oleh penguasa Majapahit, Prabhu Natha Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, dengan Portugis sebagai wakil orang Barat.²

Di sisi lain, muncul pula Sunda Empire yang klaimnya tidak kalah menarik. Mereka mengaku sebagai kekaisaran matahari atau kekaisaran bumi yang memiliki misi besar memperbaiki tatanan dunia baru dan berharap pemerintahan seluruh dunia mengikuti arahan dari Bandung. Bahkan, mereka mengklaim dapat menghentikan senjata nuklir dan didukung oleh pendiri Microsoft Bill Gates dan pendiri Ali Baba Jack Ma. Tidak hanya itu, para petinggi Sunda Empire menyatakan sedang bersiap menunggu berakhirnya kekuasaan negara-negara

² Dipna Videlia Putsanra, “Fenomena Keraton Sejagat dan Sunda Empire yang Muncul di Indonesia”, dalam <http://tirto.id/fenomena-keraton-sejagat-dan-sunda-empire-yang-muncul-di-indonesia-etfA>, 17 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

di dunia pada 15 Agustus 2020 mendatang.³

Tidak sampai di situ saja, belakangan diketahui para petinggi kerajaan fiktif ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan tuduhan utama penipuan dan penyebaran berita bohong. Tuduhan tersebut memiliki alasan yang kuat, sebab ditemukan indikasi tindakan kriminal berupa penipuan yang merugikan ‘para pengikutnya’ berjuta-juta rupiah.

Lantas, pertanyaan yang timbul adalah mengapa hingga ratusan orang yang mengikuti kerajaan fiktif tersebut? Sejarawan Wildan Sena Utama, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yakni konspirasi, frustrasi, dan eskapisme. Sebagai seorang sejarawan, ia tidak menampik bahwa fenomena ini harus dilihat dalam kacamata yang luas, tidak hanya dari kacamata historis. Karangan-karangan konspirasional yang jelas tidak masuk akal pun tetap dapat meraup pengikut, yang setelah ditelusuri didominasi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Oleh sebab itu, Wildan menyatakan ada kecenderungan frustrasi serta eskapisme dari masyarakat atas ketidakhadiran negara dalam kehidupan yang sesungguhnya. Di sisi lain, ia juga mengkritik bagaimana orientasi pendidikan di negeri ini tidak menuju pembentukan nalar kritis. Kombinasi berbagai faktor itulah yang menyebabkan fenomena ini, meski tidak rasional, tetap

³ Wildan Sena Utama, “Fantasi Kerajaan Fiktif, Fenomena Sosial Apa?”, dalam <http://news.detik.com/kolom/d-4885185/fantasi-kerajaan-fiktif-fenomena-sosial-apa>, 4 Februari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

memiliki pengikut yang banyak, yang juga menderita kerugian tidak sedikit.⁴

Pola fenomena ini sejatinya telah diprediksi sejak lama. Ong Hok Ham telah memberikan kesadaran bahwa sesungguhnya sering terjadi apa yang disebut sebagai ‘pemalsuan’ atau ‘penyalahgunaan ilmu sejarah’. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi sejarah di tengah masyarakat, seperti fungsi legitimasi atau fungsi memberi teladan bagi generasi muda. Dengan fungsi tersebut, Ong mengingatkan bahaya yang timbul darinya, yakni fakta atau proses sejarah ‘dipakai seenaknya saja’ oleh berbagai macam kalangan. Memang, fungsi legitimasi dalam berbagai tulisan sejarah sejak dahulu tidak dapat ditampilkan. Berbagai naskah kuno seperti *babad*, *hikayat*, dan sebagainya disusun untuk menonjolkan sosok teladan sekaligus mengagungkan kebesaran kerajaan. Tidak jarang, di sini terdapat upaya ‘pemalsuan’. Meski demikian, Ong menyatakan hal tersebut tidak sangat merugikan, alias *innocent*. Ong bahkan telah memprediksi pemalsuan yang berakibat pada perang, kekejaman, atau kerugian yang berdampak bagi orang banyak.⁵ Terkait pemalsuan sejarah oleh kerajaan fiktif tersebut, Pakar Budaya Kerajaan Nusantara yang juga Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia (UI), Agus Aris Munandar berpendapat senada. Ia menyatakan bahwa kerajaan fiktif tersebut telah ‘mengarang’

⁴ *Ibid.*

⁵ Ong Hok Ham, *Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018), hlm. 419-420.

sejarah. Alasannya adalah untuk menjadi ‘pembenaran’ kepada masyarakat.⁶ Dengan demikian, seharusnya melalui kesadaran sejarah, fenomena ini dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Penyalahgunaan sejarah memang tidak dapat dihindari. Hal tersebut sangat jauh dari hakikat sejarah sesungguhnya. Kuntowijoyo menegaskan hakikat sejarah melalui definisi yang lugas, yakni “sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu”.⁷ Ia pun menegaskan bahwa sejarah tentu memiliki kegunaan sehingga orang harus belajar darinya. Guna sejarah menurut Kuntowijoyo terdiri dari dua aspek, yakni guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik sejarah meliputi fungsi-fungsi pendidikan, yaitu pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu. Selain itu, sejarah juga berfungsi sebagai (9) latar belakang, (10) rujukan, dan (11) bukti.⁸

Segudang kegunaan sejarah tersebut menjadi nyata jika kesadaran untuk berpikir kritis dan bertindak rasional mulai dibangun. Pola pikir dan tindakan ini dapat diperoleh dengan

⁶ Havid Al Vizki, “Kerajaan Fiktif Mengarang Sejarah”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/q4gp1g216/kerajaan-fiktif-mengarang-sejarah>, 21 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 14.

⁸ Lihat lebih lanjut pada *ibid*, hlm. 15-28.

menumbuhkembangkan kesadaran sejarah, terlebih lagi fenomena (atau kasus kriminal) belakangan ini ‘menggunakan’ sejarah sebagai amunisi utamanya. Segenap insan bangsa dan negara harus menanamkan kesadaran sejarah sejak dini sehingga berbagai ‘pemalsuan’ sejarah dapat dihindari.

Oleh sebab itu, tulisan ini bermaksud untuk memaparkan pandangan sejumlah sejarawan dan pengamat sejarah, melalui sejumlah karyanya, terhadap konsep kesadaran sejarah dan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, melalui pandangan-pandangan tersebut, masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya kesadaran sejarah serta meningkatkan pembangunan kesadaran sejarah, yang memperkuat pemikiran kritis sekaligus memperkokoh kesatuan dan kebangsaan.

Apa itu Kesadaran Sejarah?

Pertanyaan pertama yang tentu timbul adalah apa itu kesadaran sejarah? Hans-Georg Gadamer (1900-2002), seorang ahli filsafat sejarah dari Jerman, menyatakan bahwa kesadaran sejarah adalah suatu kesadaran penuh akan historisitas setiap hal yang ada sekarang (*present*) dan relativitas dari semua opini. Kesadaran sejarah tertarik untuk mengetahui, bukan bagaimana orang-orang (*men*), manusia-manusia (*people*), atau negara-negara berkembang *pada umumnya*, melainkan sebaliknya, bagaimana orang *ini*, manusia *ini*, atau negara *ini* menjadi seperti yang

ada sekarang; bagaimana masing-masing kekhususan ini (*particulars*) dapat berlalu dan berakhir secara khusus di situ.⁹ Aspek kekhususan atau keunikan setiap pelaku sejarah ditekankan olehnya.

Robert F. Berkhofer (1931-2012), seorang ahli filsafat sejarah dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa kesadaran sejarah didasarkan pada kesadaran tentang waktu (*consciousness of time*) melalui pengalaman masa lalunya.¹⁰ Hal senada disampaikan oleh Djoko Suryo. Kesadaran sejarah sesungguhnya merupakan satu dimensi historis yang mengandung konsep waktu. Kesadaran sejarah sesungguhnya bisa dialami secara perseorangan. Akan tetapi, kesadaran sejarah yang bersifat kolektif lebih penting. Kesadaran semacam itu terdapat di setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.¹¹

Menyambung pernyataan Djoko Suryo, Taufik Abdullah menyatakan bahwa terdapat dua corak kesadaran sejarah yang masih dalam proses peralihan, yaitu kesadaran yang bersifat etnis dan kesadaran yang bersifat nasional. Kesadaran corak pertama bertolak dari *regional concept of history* yang bersifat etnis-kultural. Kesadaran ini mementingkan *fairness* kewajaran

⁹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 139-140.

¹⁰ Robert F. Berkhofer, *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, (New York: Free Press, 1969), hlm. 216-217.

¹¹ Djoko Suryo, “Kesadaran Sejarah”, dalam Ayatrohaedi (ed.), *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 25-26.

kultural demi terbinanya integrasi sosial dan kontinuitas kultural dari komunitas etnis. Kesadaran corak kedua sedang tumbuh dan ditumbuhkan. Kesadaran sejarah yang bersifat nasional di satu sisi menjalin hubungan yang bersifat antar-lokal, tetapi di sisi lain menjadikan kesadaran sejarah lokal *irrelevant*.¹² Dalam konteks kekinian, hal tersebut masih terjadi.

A. Daliman mendasarkan pengertian kesadaran sejarah berdasarkan kenyataan bahwa manusia memiliki memori. Melalui memori, manusia memiliki kesadaran sejarah, yakni menyadari pengalaman masa lampunya baik individual maupun kolektif. Kesadaran sejarah menyadarkan bagaimana masa lampau atau silam itu membentuk kehidupan manusia sekarang ini dan yang akan datang.¹³ Kesadaran sejarah menurut A. Daliman mencakup dua hal, yaitu kesadaran akan *perubahan* dan kesadaran akan *waktu*. Kesadaran akan perubahan sejatinya merupakan hal yang paradoksial. Kita semakin sadar akan adanya ketunggalan dan kebhinekaan, kontinuitas dan diskontinuitas, serta struktur dan proses pertumbuhan. Di samping itu, kesadaran akan waktu menyadarkan manusia untuk melihat masa lampau, masa kini, dan masa depan merupakan *tri tunggal* waktu yang tak terpisahkan, saling berkaitan, saling

¹² Taufik Abdullah, "Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah", dalam Ayatrohaedi (ed.), *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 5-6.

¹³ A. Daliman, *Manusia dan Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 38-39.

mengandaikan dan diandaikan.¹⁴ Senada dengan hal tersebut, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kesadaran sejarah merupakan kesadaran bahwa suatu peristiwa atau tampilnya tokoh masa lalu selalu terwujud dalam hubungan dinamik dengan faktor ruang dan waktu, sehingga hal itu tidak dapat dipandang dan dinilai sebagai hal yang berdiri sendiri.¹⁵

Ismail menjabarkan pengertian kesadaran sejarah sebagai berikut. Kesadaran sejarah adalah lebih dari sekadar mengetahui fakta-fakta sejarah. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa kesadaran sejarah semata-mata harus dimulai dari mengetahui fakta-fakta sejarah. Akan tetapi, pengetahuan akan fakta-fakta sejarah belum dapat dikatakan sebagai kesadaran sejarah. Kesadaran atau *consciousness* adalah lebih dari itu. Kesadaran sejarah adalah pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah, ditambah pengetahuan tentang sebab-musababnya antara fakta-fakta itu. Lebih lanjut, Ismail menyatakan bahwa kesadaran sejarah mencakup beberapa hal, yaitu (1) pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah serta hubungan kasualnya; (2) pengisian alam pikiran kita dengan logika; dan (3) peningkatan hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, untuk

¹⁴ A. Daliman, *Pengantar Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 74-76.

¹⁵ Nurcholish Madjid, "Masyarakat dan Kesadaran Sejarah", dalam Restu Gunawan (ed.), *Kongres Nasional Sejarah Tahun 1996 Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 165.

menghadapi masa-masa sekarang dan masa depan, dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lampau. Melalui ketiga hal tersebut, ia menegaskan bahwa kesadaran sejarah adalah suatu sikap kejiwaan dan *state of mind*, yang merupakan kekuatan untuk ikut aktif dalam proses dinamika sejarah. Jiwa yang bijaksana merupakan hikmah dari kearifan kesadaran sejarah.¹⁶ senada dengan uraian tersebut, I G. Widja secara lebih ringkas menyatakan bahwa kesadaran sejarah tidak lain merupakan kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang.¹⁷

Kesadaran sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari “apa itu sejarah”. Harlem Siahaan memaparkan bahwa terminologi sejarah bermakna ganda, yaitu sebagai (1) disiplin ilmu, (2) metode, (3) peristiwa atau kejadian, (4) kisah tentang masa lampau, dan (5) suatu bentuk kesadaran (*historical consciousness*). Terkait makna terakhir, ia menjelaskan bahwa kesadaran sejarah merupakan kristalisasi kumpulan dan rangkaian masa lalu yang sudah dianggap sebagai fakta keras atau ‘kebenaran’ sehingga dipandang patut menjadi

¹⁶ Ismail, “Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan”, dalam Anhar Gonggong (ed.), *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 25-26.

¹⁷ I G. Widja, *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*, (Semarang: Percetakan Satya Wacana, 1988), hlm. 56.

pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku.¹⁸

Berdasarkan sejumlah pendapat pengertian di atas, dapat ditarik beberapa poin penting yang berkaitan dengan kesadaran sejarah, yakni sebagai berikut. *Pertama*, kesadaran sejarah lahir dari individu yang sadar akan dirinya, lalu berkembang menjadi kesadaran kolektif di masyarakat sekitarnya. *Kedua*, kesadaran sejarah pada hakikatnya merupakan kesadaran terhadap waktu dan perubahan, kesadaran akan trilogi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. *Ketiga*, kesadaran sejarah berkaitan erat dengan konteks kultural maupun intelektual masyarakat. *Keempat*, kesadaran sejarah merupakan integrasi antara kesadaran intelektual, kultural, dan psikologis masyarakat. *Kelima*, kesadaran sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu sejarah yang berhubungan dengan konteks ‘kebenaran’ sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat.

Mengapa Kesadaran Sejarah Penting?

Sartono Kartodirdjo menyatakan dengan lugas bahwa bangsa yang tidak mengenal sejarahnya juga kehilangan identitas atau kepribadiannya. Pengetahuan sejarah merupakan sebuah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk membentuk dan memantapkan identitas serta kepribadian nasional. Oleh sebab itu, pembangunan

¹⁸ Harlem Siahaan, “Nasionalitas, Nasionalisme, dan Kesadaran Sejarah”, dalam Nina Herlina Lubis (ed.), *80 Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia*, (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat dan Satya Historika, 2001), hlm. 81.

kesadaran sejarah, melalui pengetahuan sejarah, mampu membangkitkan perasaan tanggung jawab sosial dan moral terhadap segala kegiatan pembangunan bangsa.¹⁹

Senada dengan hal itu, Helius Sjamsuddin menyatakan bahwa sejarah sebagai pengalaman-pengalaman masa lampau menjadikan manusia dapat 'berguru' dan 'belajar' untuk menjadi lebih bijak. Manusia harus dapat menarik nilai-nilai pelajaran sebagai pedoman hidup dan inspirasi untuk masa-masa yang akan datang. Ungkapan *historia magistra vitae* atau sejarah adalah guru kehidupan menjadi relevan.²⁰ Ungkapan-ungkapan lain juga dipaparkan oleh Taufik Abdullah. Jargon-jargon seperti "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah", "sejarah tak hanya pengetahuan, tetapi juga menyangkut kesadaran", hingga "belajarlah dari sejarah" sudah 'berada di luar kepala'.²¹ Ungkapan seorang filsuf asal Spanyol George Santayana (1863-1952), "mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu" menjadi relevan pada konteks kekinian. Oleh sebab itu, ungkapan klise, yang sering berseliweran di masyarakat Indonesia, seperti "masa lalu biarlah masa lalu, atau yang lalu biarlah berlalu, yang sudah terjadi biarlah terjadi, untuk apa dikenang lagi" merupakan ungkapan yang tidak berdasar.²²

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 296-297.

²⁰ Helius Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 181.

²¹ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (eds.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. ix.

²² Fitrah, "Masyarakat Indonesia dan Kesadaran

Menurut Nurcholish, kesadaran sejarah memang perlu ditanamkan dalam masyarakat. Bahkan menegaskan bahwa suatu bangsa akan sulit berkembang jika kesadaran sejarah itu tidak ada atau lemah. Kesadaran sejarah, menurutnya, merupakan pendekatan yang 'ekonomis' untuk menumbuhkembangkan kebudayaan dan peradaban melalui akumulasi pengalaman kemanusiaan.²³

Soedjatmoko, melalui artikelnya, telah lama mengingatkan bahwa kesadaran sejarah sangat diperlukan dalam proses pembangunan bangsa. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan kesadaran sejarah supaya masyarakat menjadi peka terhadap dimensi waktu di dalam proses perwujudan suatu masyarakat dan kebudayaan baru. Kesadaran sejarah juga membimbing manusia pada pengertian mengenai diri sendiri sebagai bangsa, kepada *self understanding of a nation*, kepada *sangkan paran* (asal-usul dan tujuan) suatu bangsa, persoalan *what we are, why we are, what we are*. Dengan kesadaran sejarah, fenomena yang ia sebut sebagai *instant utopianism*, yang timbul dari frustrasi-frustrasi yang sangat tajam dan radikal yang buta, dapat dihadapi. Soedjatmoko pun pada akhirnya menegaskan bahwa kesadaran sejarah adalah urusan kita semua, seluruh bangsa Indonesia.²⁴ Menjadi menarik bahwa apa

Sejarah", dalam <http://geotimes.co.id/opini/masyarakat-indonesia-dan-kesadaran-sejarah/>, 23 September 2018, diakses pada 29 Februari 2020.

²³ Nurcholish Madjid, *op.cit*, hlm. 168.

²⁴ Soedjatmoko, "Kesadaran Sejarah dan Pembangunan", *Prisma*, Vol. V, No. 7, 1976, hlm. 12-14.

yang diutarakan Soedjatmoko sejak lama terjadi kembali pada konteks kekinian, dengan munculnya sejumlah kerajaan fiktif sebagaimana disampaikan di awal. Senada dengan pernyataan Soedjatmoko, Ismail menyatakan bahwa kesadaran sejarah sangat diperlukan dalam pembangunan. Ia merumuskan secara ringkas bahwa dengan adanya kesadaran sejarah, bangsa Indonesia akan berkembang menjadi lebih baru, lebih maju, lebih kaya, namun tanpa kehilangan identitas, kehilangan kepribadian, dan kehancuran dasar kultural. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 'berketahanan nasional'.²⁵

Pernyataan serupa diutarakan oleh S. Budhisantoso. Ia menempatkan kesadaran sejarah dalam kerangka pembinaan budaya bangsa. Melalui kesadaran sejarah, masyarakat menjadi sadar bahwa Indonesia terlahir sebagai satu kesatuan sosial melalui proses sejarah yang akhirnya mempersatukan banyak suku bangsa dalam satu bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa kesadaran sejarah dapat berfungsi sebagai pengikat (penguat integrasi bangsa) dan pengarah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang pendahulu, melainkan juga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan pembaruan lingkungan lebih luas.²⁶

²⁵ Ismail, *op.cit*, hlm. 38-40.

²⁶ S. Budhisantoso, "Kesadaran Sejarah dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia", dalam Ayatrohaedi (ed.), *Pemikiran tentang*

Harlem Siahaan menegaskan pernyataan S. Budhisantoso. Ia menyimpulkan bahwa kesadaran sejarah memiliki korelasi tak terpisahkan dengan nasionalitas dan nasionalisme. Nasionalitas merupakan fenomena awal menuju pembentukan negara-bangsa. Pembentukan ini kemudian diperkuat dengan ideologi kebangsaan (nasionalisme). Ideologi ini dapat terbangun dengan mapan apabila kesadaran sejarah terus dibina. Derajat kohesi dan integrasi bangsa dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan kesadaran sejarah. Sebagai sebuah kesadaran kolektif, kesadaran sejarah seharusnya menghadirkan pengalaman masa lalu yang tidak diskriminatif sehingga tidak memicu 'kebangkitan' dendam sejarah yang menjadi faktor utama disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, kesadaran sejarah diperlukan sebagai sumber inspirasi dan dorongan bagi kemajuan negara-bangsa di masa depan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sartono di awal, ketiadaan rasa bangga (*sense of pride*) melalui kesadaran sejarah merupakan awal 'keruntuhan' sebuah negara-bangsa.²⁷

Dalam konteks kemajuan zaman, Juraid Abdul Latief menyatakan bahwa kehidupan dewasa ini semakin mengarah pada pola kehidupan yang pragmatis. Pertanyaan kemudian timbul, yakni 'apa

Pembinaan Kesadaran Sejarah, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 22-23.

²⁷ Harlem Siahaan, *op.cit*, hlm. 91-92.

kegunaan atau keuntungan praktis dari pembinaan kesadaran sejarah?’ Juraid menegaskan bahwa jika keuntungan materi yang dicari, maka tidak akan ditemukan apa-apa. Akan tetapi, pembangunan mental, semangat jiwa etis, dan muatan moral terkandung di dalamnya. Nilai-nilai elementer suatu bangsa, seperti nasionalisme, patriotisme, demokrasi, cinta damai dan kejujuran, keadilan, dan sebagainya menjadi semakin relevan jika dihadapkan pada tantangan masa kini. Ia memberikan contoh secara konkret. Kesadaran sejarah tidak mengajarkan suatu teknologi, tetapi melalui kesadaran sejarah, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi ‘liar’. Semangat berteknologi dapat lahir dari kesadaran sejarah. Oleh sebab itu, seharusnya kesadaran sejarah tidak lagi dinilai sebagai sesuatu yang ‘ketinggalan zaman’.²⁸

Jika pernyataan Juraid dihubungkan dengan konteks fenomena kerajaan fiktif, dapat dilihat sebuah kontradiksi bahwa tanpa pembinaan kesadaran sejarah yang berkelanjutan, ‘keuntungan materi’ diperoleh secara tidak bertanggung jawab. Mentalitas ‘jalan pintas’ terbukti menuai dampak destruktif bagi pengembangan pemikiran kritis sekaligus jiwa kebangsaan (integratif). Tentu, hal ini patut ditanggulangi, sebab bukan hal yang mustahil fenomena demikian dapat berulang, bahkan menimbulkan dampak destruktif yang lebih besar.

²⁸ Juraid Abdul Latief, *Manusia, Filsafat, dan Sejarah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 48-53.

Dalam konteks lebih luas, era saat ini merupakan era derasnya arus informasi akibat pesatnya kemajuan teknologi. Konsekuensinya adalah seringkali informasi yang beredar tidak dapat diperiksa ‘kebenaran’ faktual-argumentatifnya. Informasi yang berseliweran cenderung memikat secara psikologis, tetapi ‘membahayakan’ secara logis. Sebagian besar masyarakat menjadi percaya atas informasi yang diterima tanpa disaring secara kritis, terlebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan substansi historis. Era inilah yang disebut sebagai era pasca-kebenaran (*post-truth*) menurut Lee McIntyre.²⁹

Bagaimana Cara Membangun Kesadaran Sejarah?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terdapat satu hal penting yang patut dipahami, yakni bagaimana kesadaran sejarah berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seperti telah disampaikan sebelumnya, terutama oleh Taufik Abdullah, kesadaran sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari kesadaran sejarah lokal dan kesadaran sejarah nasional. Sartono Kartodirdjo menjelaskannya lebih rinci bagaimana kesadaran sejarah masyarakat Indonesia tradisional telah muncul, melalui sejumlah warisan seperti tradisi lisan dan tertulis, prasasti, kronik, hikayat, babad, dan sebagainya. Dalam warisan tersebut, wacana sejarah yang dibangun (*historiografi*) tidak terlepas dari

²⁹ Lee McIntyre, *Post-Truth*, (Cambridge: MIT Press, 2018), hlm. 5.

perspektif kosmosentris dan mitologisasi. Seiring berjalannya waktu, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pendidikan Barat yang telah masuk menyebabkan pergeseran perspektif historiografi menjadi antroposentris dan demitologisasi mulai terjadi.³⁰

Memasuki abad ke-20, pergerakan nasional semakin kentara. Nasionalisme diperkenalkan oleh sejumlah kaum terpelajar. Jika ditelusuri lebih lanjut, kelahiran ini tidak terlepas dari kesadaran sejarah sebagai sesama orang terjajah (*colonized*), pribumi (*inlander*), bermentalitas inferior, dan golongan marginal. Tidak hanya itu, kejayaan bangsa di masa lampau juga berkaitan erat dengan gerakan emansipasi dan perlawanan terhadap kolonialisme. Menurut Sartono, lewat sejarah, orang dapat “menemukan dan mengenal dirinya sendiri”. Kesadaran sejarah membangkitkan apa yang dikenal sebagai perasaan sejarah (*historical sense*).³¹

Sartono kemudian menyampaikan bahwa sejatinya kesadaran sejarah berawal dari kesadaran terhadap jati diri individu. Melalui proses penyadaran diri, kesadaran diri kolektif mulai terbangun. Kesadaran diri kolektif ini kemudian membentuk rasa kebersamaan yang dilambungkan dengan identitas tertentu.

³⁰ Sartono Kartodirdjo, “Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional”, dalam Anhar Gonggong (ed.), *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 49-51.

³¹ *Ibid*, hlm. 51-55.

Dari sinilah muncul kepribadian dan identitas nasional yang mencakup unsur-unsur kebudayaan nasional untuk mendukung solidaritas dan integrasi nasional.³²

Hariyono mengutarakan pernyataan serupa. Menurutnya, apa yang disebut sebagai wawasan sejarah telah dimiliki oleh masyarakat tradisional, sekalipun hal ini dibedakan dalam konsepsi dunia akademis sebagai ‘pandangan mitis’. Wawasan sejarah dan kesadaran sejarah berjalan beriringan. Wawasan sejarah lebih menekankan strategi kognitif, sedangkan kesadaran sejarah lebih merujuk pada keterampilan afektif dan sosial. Wawasan sejarah masyarakat tradisional tetap mengandung strategi kognitif yang berorientasi kepada kekuasaan adikodrati, sedangkan wawasan sejarah masyarakat modern didukung oleh cakrawala kognitif yang luas dan fleksibel. Inti ‘peralihan’ wawasan sejarah demikian adalah peran manusia dalam proses sejarah. Manusia dipandang tidak lagi sebagai objek sejarah, tetapi sebagai subjek sejarah. Manusia menjadi sadar terhadap aspek kronologis serta dimensi prosedural dan struktural yang sejatinya tidak dapat dielakkan. Wawasan sejarah yang merupakan bagian dari kognisi pun membawa pengaruh terhadap rasa penghayatan sejarah, yang disebut sebagai kesadaran sejarah.³³

Kembali kepada persoalan cara membangun kesadaran sejarah. Taufik Abdullah mengingatkan bahwa sebaiknya

³² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial...*, hlm. 277-280.

³³ Hariyono, *Mempelajari Sejarah secara Efektif*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 36-39.

diadakan lebih dahulu apa yang disebut sebagai ‘penjernihan sejarah’. Ia menyatakan ada empat corak penjernihan sejarah. *Pertama*, penjernihan ditujukan kepada rekonstruksi yang berantakan, yang tak bisa dipertanggungjawabkan, seperti kekacauan substansi fakta historis. *Kedua*, penjernihan untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuan sejarah, akibat kurangnya atau tidak adanya sumber informasi, seperti kekosongan narasi historis dalam satu periode tertentu. *Ketiga*, penjernihan terhadap mitologisasi dan ideologisasi yang telah terjadi terhadap sejarah. *Keempat*, penjernihan untuk mengembalikan peristiwa dalam konteks sejarahnya. Upaya penjernihan sejarah harus sekurang-kurangnya mencapai tiga sasaran, yakni (1) menjawab pertanyaan yang bersifat elementer, seperti apa, siapa, di mana, dan apabila; (2) kepastian keakuratan berbagai sumber tak langsung akibat ketiadaan sumber yang lebih sahih; dan (3) mencegah timbulnya masalah anakronisme, yaitu kekacauan dalam dimensi waktu, baik dalam kesadaran maupun dalam rekonstruksi peristiwa.³⁴ Upaya serupa juga diutarakan oleh Ayatrohaedi. Ia menegaskan perlunya empat kejernihan dalam sejarah yang perlu dilakukan untuk membina kesadaran sejarah. *Pertama*, kejernihan wawasan. *Kedua*, kejernihan gagasan untuk mengisi wawasan tersebut. *Ketiga*, kejernihan landasan teori, metodologi, dan sebagainya. *Keempat*, kejernihan

³⁴ Taufik Abdullah, “Pembinaan Kesadaran Sejarah ...”, hlm. 6-7.

kupasan yang mencakup berbagai tulisan, penyuluhan, dan sebagainya.³⁵

Para sejarawan merupakan salah satu garda terdepan dalam membangun kesadaran sejarah. Soedjatmoko menyatakan bahwa sejarawan memiliki tantangan yang besar, baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Di satu sisi, sejarawan harus bergelut dalam usaha penyusunan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi di sisi lain, sejarawan harus berhadapan dengan masyarakat yang seringkali memiliki ‘rasa hayat ahistoris’, terutama oleh keberadaan mitos di tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan sejarah bercorak nasionalis. Dalam banyak hal, kedua sisi ini saling berbenturan.³⁶ Oleh sebab itu, ia menegaskan perlunya kebebasan penyelidikan sejarah, terutama bagi sejarawan, atau kesadaran sejarah serta penyelidikan sejarah yang terus menerus dan bebas. Bahaya ‘kesesatan’ yang dapat ditimbulkan dari sejarah pun dapat

³⁵ Ayatrohaedi, “Pembinaan dan Kesadaran Sejarah”, dalam Ayatrohaedi (ed.), *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 37.

³⁶ Lihat selengkapnya pada Soedjatmoko, “Sejarawan Indonesia dan Zamannya”, dalam Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, dan G. McT. Kahin (eds.), *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 358-370. Lihat juga Taufik Abdullah, “Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis”, dalam T. Ibrahim Alfian, H.J. Koesoemanto, Dharmono Hardjowidjono, dan Djoko Suryo (eds.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 244-245.

dihindari. Melalui ‘merenungkan sejarah’ dan ‘hidup bersejarah’, sesungguhnya manusia sudah merintis hari depan.³⁷

Sejarawan memang memiliki tugas yang besar dalam membangun kesadaran sejarah. Menurut Haryati Soebadio, mereka sejatinya melakukan dua hal yang beriringan, yakni mengembangkan kesadaran sejarah sekaligus kesadaran ilmiah. Hal ini pun bermuara pada peningkatan mutu para sejarawan dan ilmu sejarah di Indonesia. Peningkatan kemampuan sejarawan sebagai guru dan peneliti diharapkan berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat akan hal-hal sejarah secara wajar. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini termasuk pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸

Selain sejarawan yang memiliki tugas berat dalam membangun kesadaran sejarah, dunia pendidikan juga berkaitan erat untuk memasyarakatkan kesadaran sejarah. Sartono menyatakan bahwa pelajaran sejarah merupakan salah satu alat pendidikan *civics* (kewarganegaraan) yang penting. Pelajaran sejarah mengandung unsur narasi integratif sehingga dinilai mampu menghidupkan

kepribadian bangsa Indonesia.³⁹ Prinsip-prinsip yang terkandung pelajaran sejarah (nasional) dinilai relevan dalam era membangun bangsa dan negara, yakni kesatuan/persatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamarataan (*equality*), kepribadian (*individuality*), dan hasil karya (*performance*).⁴⁰

Banyak pemikir menyatakan pentingnya pelajaran atau pendidikan sejarah. Salah satunya adalah W.J. van der Meulen, SJ. Ia menyatakan bahwa pendidikan sejarah tidak semata-mata menghadirkan sejumlah fakta historis, tetapi juga menjelaskan proses-proses perubahan yang berkesinambungan tentang pasang surutnya kehidupan kemasyarakatan dalam lingkungan bangsanya sendiri dan umat manusia. Dalam konteks yang lebih luas, van der Meulen berpandangan bahwa ilmu sejarah bisa disifatkan sebagai “cinta bangsa dan manusia yang mencari pengertian”. Kecintaan terhadap bangsa dan manusia harus diperdalam dengan pengertiannya terhadap masa lalu.⁴¹ Moh. Ali juga menyatakan bahwa pelajaran sejarah memang tidak hanya memperkenalkan riwayat manusia pada masa lalu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Ia menitikberatkan nilai-nilai perjuangan manusia, baik secara umum maupun dalam konteks nasional, di dalam

³⁷ Soedjatmoko, “Merintis Hari Depan”, dalam Panitia Seminar Sejarah Tahun 1957, *Laporan Seminar Sejarah pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 137-139.

³⁸ Haryati Soebadio, “Sejarah sebagai Ilmu”, dalam Ayatrohaedi (ed.), *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 4.

³⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 324-325.

⁴⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial ...*, hlm. 297.

⁴¹ W.J. van der Meulen, SJ, *Ilmu Sejarah dan Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 83-84.

pelajaran sejarah.⁴²

Hal senada juga disampaikan oleh Nurcholish. Pelajaran sejarah yang membangun kesadaran sejarah tidak semata-mata membangun kemampuan mengingat dan menghafal kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh masa lalu saja. Kesadaran sejarah yang dihasilkan juga tidak sama dengan sekadar kemampuan mengingat dan menceritakan kejadian atau tampilnya tokoh, lengkap dengan keterangan tentang kapan dan di mana, misalnya. Ia mengandaikan bahwa kesadaran sejarah yang dibangun berakibat pada sikap penisbian terhadap kejadian dan tokoh masa lalu. Kesadaran sejarah demikian melahirkan cara pandang yang kritis dan dinamis. Masa lalu dapat 'dibuka' untuk dipersoalkan, dan terus menerus dipersoalkan kembali.⁴³

Pendidikan diamini sebagai salah satu cara membangun kesadaran sejarah sejak dini. Nur Janti mengulas bagaimana pelajaran sejarah, sekaligus kesadaran sejarah, ditanamkan kepada generasi yang paling awal, yakni anak-anak. Ia mengawali ulasannya dengan mengangkat opini populer bahwa pelajaran sejarah dicap membosankan dan penuh hafalan. Akan tetapi, dalam konteks perkembangan pola pemahaman anak-anak, ia menegaskan perlunya pendekatan yang 'ringan', seperti pendekatan sejarah lokal, sebagaimana diutarakan oleh Sartono Kartodirdjo sejak lama. Dengan memahami seluk-beluk

daerahnya, anak-anak dapat mencari hubungannya dalam konteks yang lebih luas, yakni nasional. Nur menegaskan pelajaran sejarah dalam segala aspeknya harus menekankan kesadaran tentang hakikat perkembangan budaya dan peradaban manusia. Oleh sebab itu, sejatinya pembelajaran sejarah bermuara pada kelahiran kesadaran sejarah. Dalam ranah yang lebih konkret, ia mengajukan perlu munculnya 'sejarawan cilik' yang tidak sekadar didongengi. Anak-anak diajak untuk melihat keadaan sekitarnya dari yang paling kecil, seperti rumah, sekolah, tetangga, desa, dan sebagainya. Mereka juga dapat menjelajahi tempat bersejarah, atau mendengar cerita dari tetua desa setempat. Pengajaran sejarah juga dapat dimulai dari sejarah keluarga, sejarah produk budaya, seperti cara makan, cara berpakaian, dan sebagainya. Dengan hal tersebut, kemampuan imajinasi mereka mulai terbangun untuk menghayati pengetahuan sejarah yang sifatnya abstrak tersebut. Mereka juga dapat merasakan bahwa sejarah tidak hadir 'jauh sekali', tetapi 'sangat dekat' dengan mereka.⁴⁴

Selain dari kalangan akademisi, terutama sejarawan, dan pelaku dalam dunia pendidikan, berbagai elemen masyarakat tentu dapat membangun kesadaran sejarah sesuai dengan 'jiwa zamannya' (*zeitgeist*). Salah satunya adalah pemberdayaan komunitas sejarah. Komunitas sejarah dapat berkolaborasi dengan sejarawan untuk menghadirkan

⁴² R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 359-364.

⁴³ Nurcholish Madjid, *op.cit*, hlm. 165.

⁴⁴ Nur Janti, "Menjadi Sejarawan Cilik: Belajar Sejarah dari Dekat", *Abad*, Vol. 03, No. 1, 2019, hlm. 57-63.

apa yang disebut sebagai ‘sejarah publik’. Terminologi ini dapat dilacak dari fenomena yang terjadi di Inggris sejak 1930-an, tetapi mulai intensif sejak 1960-an. Sejarah publik mengandaikan komunikasi dan pelibatan publik sebagai satu hal yang hakiki dalam perkembangan keilmuan sejarah, baik ke dalam maupun ke luar.⁴⁵

Farabi Fakih, sejarawan UGM, menyatakan bahwa peran komunitas sejarah untuk menghidupkan sejarah publik sangat besar di tengah masyarakat. Ia menyoroti peran komunitas sejarah untuk menggairahkan rasa sekaligus kesadaran sejarah masyarakat melalui sejarah identitas kota. Farabi menyatakan bahwa kolaborasi antara komunitas sejarah dan sejarawan (akademis) harus semakin digiatkan. “Sejarawan bisa membantu mengenai masalah metodologi lalu akses sumber, dan komunitas bisa melengkapi perspektif. Komunitas ini *kan* sudah memiliki sudut pandang menciptakan masyarakat sipil yang kuat atau lingkungan yang inklusif,” ungkapnya. Kesadaran sejarah pun tercipta di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi dekat terhadap sejarah identitasnya sekaligus peduli terhadap lingkungan sekitarnya akibat perasaan memiliki sebuah kota tempat mereka bernaung.⁴⁶

Apa yang diutarakan oleh Farabi menjadi konkret, salah satunya dalam

⁴⁵ Faye Sayer, *Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 1-25.

⁴⁶ Aryono, “Kesadaran Sejarah Tumbuhkan Kepedulian pada Kota”, dalam <http://historia.id/politik/articles/kesadaran-sejarah-tumbuhkan-kepedulian-pada-kota-6kRO2>, diakses pada 29 Februari 2020.

kegiatan belajar sejarah sekaligus peduli lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan napak tilas, dibawah komunitas Depok Beragam, dengan tema “Nelusurin Sejarah, Mungutin Sampah”. Melalui kegiatan ini, sejumlah elemen masyarakat dan pelajar Kota Depok ikut peduli dengan lingkungan Sungai Ciliwung sekaligus mempelajari peran besar Sungai Ciliwung dalam sejarah, khususnya keberagaman masyarakat yang terbangun di Depok. Sejarawan J.J. Rizal menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk menghargai Ciliwung sebagai suatu ‘situs sejarah besar, ruang sejarah’, dan museum hidup’ bagi masyarakat Depok.⁴⁷ Dengan demikian, kesadaran sejarah sudah menjadi ‘barang publik’ yang dapat melibatkan siapa pun, tanpa terkecuali.

Selain pendidikan inklusif dan peningkatan partisipasi publik, kesadaran sejarah juga dapat dibangun melalui sikap selektif dalam menghadapi era globalisasi informasi sehingga lebih banyak kegunaan daripada kebingungan yang ditimbulkan.⁴⁸ Istilah yang diungkapkan oleh Ryadi Gunawan dua dekade yang lalu kini dikenal sebagai era *post-truth*. Senada dengan Ryadi, Haryatmoko menyatakan bahwa sikap

⁴⁷ Vini Rizki Amelia, “Punguti Sampah Sambil Belajar Sejarah di Ciliwung, Bangun Kepedulian Anak Muda pada Lingkungan”, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2019/09/29/punguti-sampah-sambil-belajar-sejarah-di-ciliwung-bangun-kepedulian-anak-muda-pada-lingkungan?page=all>, 29 September 2019, diakses pada 29 Februari 2020.

⁴⁸ Ryadi Gunawan, “Kesadaran Sejarah Indonesia dan Tantangan Masa Depan”, dalam Hendro Sumartono (ed.), *Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia*, (Jember: Penerbit Universitas Jember, 2000), hlm. 151.

selektif, bukan skeptis, melalui verifikasi kebenaran substansial-faktual, dalam hal ini yang bersifat historis, menyebabkan dampak destruktif berita bohong dapat diantisipasi. Apa yang disebut sebagai *media literacy* menjadi sangat penting, juga dalam pengembangan kesadaran sejarah dalam konteks kekinian.⁴⁹ Hal ini tidak dapat terlepas dari hakikat masyarakat kini, bahwa mereka telah menjadi masyarakat informasi yang tidak dapat membendung ‘tsunami’ informasi. Di sinilah letak peran *digital native* atau ‘generasi milenial’ untuk terlibat aktif di dalam pembangunan pemikiran kritis sekaligus rasa kebangsaan dalam bingkai kesadaran sejarah.⁵⁰ Dengan demikian, kesadaran sejarah bukanlah ketinggalan zaman, melainkan dapat berjalan beriringan sesuai jiwa zamannya.

Kesimpulan

Kesadaran sejarah merupakan sebuah sikap yang sadar terhadap waktu dan perubahan. Kesadaran sejarah lahir berawal dari kesadaran terhadap eksistensi diri, lalu berkembang menjadi kesadaran kolektif yang meliputi masyarakat, bangsa, dan negara. Kesadaran sejarah berjalan beriringan dengan pertumbuhan wawasan sejarah, baik pada masyarakat tradisional maupun

masyarakat modern. Kesadaran sejarah mengindikasikan adanya kesadaran terhadap konsep waktu yang tidak dapat dipisahkan, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selain itu, kesadaran sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu sejarah, terutama dalam konteks sejarah di tengah masyarakat yang mengandung ‘kebenaran’ untuk menjadi pedoman sikap dan berperilaku.

Kesadaran sejarah yang merupakan kesadaran dalam aspek afektif tidak terlepas dari aspek kognitif yang mengandalkan logika. Fakta-fakta sejarah menjadi penting di dalam kesadaran sejarah, namun kesadaran sejarah dapat melahirkan kearifan atau kebijaksanaan dalam menapaki masa kini dan menyongsong masa depan. Berdasarkan masa lalu, kesadaran sejarah mendorong masyarakat untuk tidak melupakan identitasnya, yang dalam hal ini sangat berguna dalam rangka pembangunan bangsa. Solidaritas nasional, tanggung jawab sosial dan moral, serta kebudayaan bangsa menjadi berkembang akibat kesadaran sejarah. Kemajuan peradaban bangsa tidak terlepas dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Dalam konteks kekinian, kesadaran sejarah tetap memiliki relevansi untuk menghadapi kemajuan teknologi sekaligus fenomena yang dinilai mengancam integrasi bangsa, misal dalam derasnya arus informasi di era pasca-kebenaran saat ini.

Untuk membangun kesadaran sejarah, mula-mula diperlukan upaya penjernihan sejarah. Pada hakikatnya,

⁴⁹ Haryatmoko, “Era *Post-truth* dan Prasangka Negatif”, dalam Agus Suwignyo (ed.), *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme: Forum Mangunwijaya 2018*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), hlm. 3-19.

⁵⁰ Agus Suwignyo, “Pendahuluan”, dalam Agus Suwignyo (ed.), *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme: Forum Mangunwijaya 2018*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), hlm. xx-xxi.

upaya ini diperlukan untuk membangun wawasan sejarah yang menempatkan peristiwa masa lalu pada konteksnya secara tepat. Di sini, peran sejarawan sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Sejarawan berperan besar, selain untuk perkembangan keilmuan sejarah, juga untuk memasyarakatkan sejarah sekaligus membina kesadaran sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran sejarawan menjadi berat ketika harus dihadapkan dengan realitas dan ekspektasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi halangan, selama peningkatan kapasitas sejarawan terus dilakukan dan sejarawan dapat turut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, peran dunia pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Pelajaran sejarah, selain mengandung fakta-fakta historis, juga harus mampu menanamkan kesadaran sejarah sejak dini. Dari sini, pemikiran kritis dapat terbangun sekaligus kepekaan terhadap lingkungan sekitar, yang bermuara pada integrasi bangsa, dapat terbina secara baik. Upaya dunia pendidikan dalam membangun kesadaran sejarah dapat disesuaikan dengan konteks kekinian dan jenjang usia. Terakhir, peran masyarakat luas juga penting dan jelas dibutuhkan. Komunitas sejarah dapat menjadi pelopor pembangunan kesadaran sejarah, yang dimulai dari peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kekinian, generasi milenial yang terutama ‘melek teknologi’ dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran sejarah di tengah masyarakat. Dengan demikian,

pemikiran kritis sekaligus rasa kebangsaan yang mempersatukan (integratif), sebagai bagian tak terpisahkan dari kesadaran sejarah, dapat terus tumbuh dan berkembang, menjadi semakin nyata, dan sejarah dapat dirasakan menjadi milik semua.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Taufik. 2012. “Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah”, dalam Ayatrohaedi (ed.). *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1987. “Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis”, dalam T. Ibrahim Alfian, H.J. Koesoemanto, Dharmono Hardjowidjono, dan Djoko Suryo (eds.). *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo (eds.). 2016. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Yogyakarta: Ombak.
- Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ayatrohaedi. 2012. “Pembinaan dan Kesadaran Sejarah”, dalam Ayatrohaedi (ed.). *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Berkhofer, Robert F. 1969. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: Free Press.
- Budhisantoso, S. 2012. “Kesadaran Sejarah dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia”, dalam Ayatrohaedi

- (ed.). *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Daliman, A. 2017. *Pengantar Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- . 2012. *Manusia dan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Gunawan, Ryadi. 2000. “Kesadaran Sejarah Indonesia dan Tantangan Masa Depan”, dalam Hendro Sumartono (ed.). *Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia*. Jember: Penerbit Universitas Jember.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Haryatmoko. 2019. “Era Post-truth dan Prasangka Negatif”, dalam Agus Suwignyo (ed.). *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme: Forum Mangunwijaya 2018*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ismail. 1990. “Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan”, dalam Anhar Gonggong (ed.). *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, Sartono. 2017. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- . 2014. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- . 1990. “Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional”, dalam Anhar Gonggong (ed.). *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latief, Juraid Abdul. 2006. *Manusia, Filsafat, dan Sejarah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Madjid, Nurcholish. 1997. “Masyarakat dan Kesadaran Sejarah”, dalam Restu Gunawan(ed.). *Kongres Nasional Sejarah Tahun 1996 Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- McIntyre, Lee. 2018. *Post-Truth*. Cambridge: MIT Press.
- Ong, Hok Ham. 2018. *Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Sayer, Faye. 2017. *Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Ombak.
- Siahaan, Harlem. 2001. “Nasionalitas, Nasionalisme, dan Kesadaran Sejarah”, dalam Nina Herlina Lubis (ed.). *80 Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia*. Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat dan Satya Historika.
- Sjamsuddin, Helius. 2019. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soebadio, Haryati. 2012. “Sejarah sebagai Ilmu”, dalam Ayatrohaedi (ed.). *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soedjatmoko. 2017. “Merintis Hari Depan”, dalam Panitia Seminar Sejarah Tahun 1957. *Laporan Seminar Sejarah pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Ombak.
- . 1985. “Sejarawan Indonesia dan zamannya”, dalam Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, dan G. McT. Kahin (eds.). *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suryo, Djoko. 2012. "Kesadaran Sejarah", dalam Ayatrohaedi (ed.). *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Suwignyo, Agus. 2019. "Pendahuluan", dalam Agus Suwignyo (ed.). *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme: Forum Mangunwijaya 2018*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Van der Meulen, SJ, W.J. 1987. *Ilmu Sejarah dan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Widja, I G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Percetakan Satya Wacana.

Putsanra, Dipna Videlia, "Fenomena Keraton Sejagat dan Sunda Empire yang Muncul di Indonesia", dalam <http://tirto.id/fenomena-keraton-sejagat-dan-sunda-empire-yang-muncul-di-indonesia-etfA>, 17 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

Utama, Wildan Sena, "Fantasi Kerajaan Fiktif, Fenomena Sosial Apa?" dalam <http://news.detik.com/kolom/d-4885185/fantasi-kerajaan-fiktif-fenomena-sosial-apa>, 4 Februari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

Vizki, Havid Al, "Kerajaan Fiktif Mengarang Sejarah", dalam <http://www.republika.co.id/berita/q4gp1g216/kerajaan-fiktif-mengarang-sejarah>, 21 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2020.

Jurnal

Janti, Nur. 2019. "Menjadi Sejarawan Cilik: Belajar Sejarah dari Dekat". *Abad*. Vol. 03. No. 1.

Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah dan Pembangunan". *Prisma*. Vol. V. No. 7.

Website

Amelia, Vini Rizki, "Punguti Sampah Sambil Belajar Sejarah di Ciliwung, Bangun Kepedulian Anak Muda pada Lingkungan", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2019/09/29/punguti-sampah-sambil-belajar-sejarah-di-ciliwung-bangun-kepedulian-anak-muda-pada-lingkungan?page=all>, 29 September 2019, diakses pada 29 Februari 2020.

Aryono, "Kesadaran Sejarah Tumbuhkan Kepedulian pada Kota", dalam <http://historia.id/politik/articles/kesadaran-sejarah-tumbuhkan-kepedulian-pada-kota-6kRO2>, diakses pada 29 Februari 2020.

Fitrah, "Masyarakat Indonesia dan Kesadaran Sejarah", dalam <http://geotimes.co.id/opini/masyarakat-indonesia-dan-kesadaran-sejarah/>, 23 September 2018, diakses pada 29 Februari 2020.